

Peningkatan Akses Usaha Mikro Kecil Menengah Berbasis Pendampingan Inovasi dan Kolaborasi di Kabupaten Majalengka

Teni Novianti^{1*}

¹*Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Indonesia*

* *Corresponding Author: teninovianti.83@gmail.com*

Received: 02-10-2024,

Revised: 13-10-2024,

Accepted: 01-11-2024

Abstrak

Program pendampingan UMKM yang telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat sebagai salah satu program unggulan untuk mencapai Jabar Juara Lahir Batin melalui inovasi dan kolaborasi. Permasalahan yang dihadapi oleh beberapa UMKM di Kabupaten Majalengka yaitu akses perizinan dan akses pemasaran yang masih terbatas. Oleh karena itu perlu adanya upaya sinergitas berbasis inovasi dan kolaborasi dalam mendorong UMKM dalam peningkatan akses usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan akses usaha setelah dilakukan pendampingan pada program UMKM berbasis inovasi dan kolaborasi di Kabupaten Majalengka. Metode penelitian yang dilakukan dengan cara pendampingan berbasis inovasi dan kolaborasi dilakukan pada pelaku usaha dampingan yang menjadi peserta program UMKM Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2023-2024 sebanyak 50 UMKM di Kabupaten Majalengka. Melalui kegiatan penelitian ini diperoleh hasil pendampingan UMKM melalui sinergitas inovasi dan kolaborasi dapat meningkatkan akses usaha melalui perizinan sebanyak 80%, peningkatan pemasaran 64% dan bangkit dari pandemi 82 %.

Kata kunci: Pendampingan UMKM, Inovasi, Kolaborasi, Akses Usaha

Abstract

The MSME mentoring program has been designated by the Governor of West Java as one of the superior programs to achieve West Java's Inner and Inner Champion through innovation and collaboration. The problems faced by several MSMEs in Majalengka Regency are limited access to permits and marketing access. Therefore, there is a need for synergy efforts based on innovation and collaboration to encourage MSMEs to increase business access. This research aims to determine the increase in business access after providing assistance to the innovation and collaboration-based MSME program in Majalengka Regency. The research method was carried out by means of innovation and collaboration-based assistance, carried out on assisted business actors who were participants in the 2023-2024 West Java Provincial Cooperative and Small Business Service MSME program, totaling 50 MSMEs in Majalengka Regency. Through this research activity, the results obtained from assisting MSMEs through the synergy of innovation and collaboration can increase business access through licensing by 80%, increase marketing by 64% and recover from the pandemic by 82%.

Keywords: MSME Assistance, Innovation, Collaboration, Business Access

PENDAHULUAN

UMKM saat ini menjadi sorotan karena perannya yang besar dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia (Ningsih *et al.*, 2019). Peran UMKM sangat penting dalam

mempercepat perkembangan perekonomian dan memberikan kontribusi yang cukup tinggi untuk ekonomi negara (Soebiantoro dan Haryanti, 2024). Pengembangan usaha mikro dan kecil Usaha Menengah (UMKM) diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang semakin berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi dan diberdayakan kompetitif dengan produk impor, terutama di menyediakan barang dan jasa yang diperlukan masyarakat sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perubahan struktural dan memperkuat ekonomi domestik. Pengembangan UMKM dilaksanakan melalui peningkatan penguatan kompetensi kewirausahaan dan peningkatan produktivitas didukung oleh upaya untuk meningkatkan adaptasi untuk kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim bisnis yang sehat (Kurdi *et al.*, 2024).

Rasio usaha mikro, kecil dan menengah di Jawa Barat saat ini didominasi oleh usaha mikro. Hal ini menunjukkan kinerja usaha yang belum menunjukkan prestasi yang baik. Di sisi lain, pengembangan ekonomi mulai mengarah pada era digitalisasi yang memberikan peluang bagi pertumbuhan usaha. Sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 di Jawa Barat, sesuai dengan RPJMD Perubahan pada tahun 2018-2023 mencetak 1.300 usaha pemula per tahun sehingga jumlah usaha pemula sebanyak 3.900 usaha pemula (Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, 2023). Berdasarkan data sebaran UMKM Jawa Barat dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat (2020), sebanyak 174 UMKM di Kabupaten Majalengka terdampak Covid-19 yaitu terdapat penurunan kegiatan produksi dan pendapatan menurun karena berkurangnya aktifitas masyarakat di luar sebagai konsumen serta terjadinya pemberhentian sementara operasi usaha karena kesulitan permodalan dan kesulitan bahan baku (Nur *et al.*, 2022). Permasalahan lain terkait UMKM di Kabupaten Majalengka yaitu berkaitan dengan akses usaha seperti akses perizinan dan akses pemasaran yang masih terbatas. Oleh karena itu diperlukan adanya upaya sinergitas berbasis inovasi dan kolaborasi dalam mendorong UMKM untuk dapat meningkatkan akses usaha.

Sinergitas dalam pemberdayaan UMKM dapat dilakukan dengan berbagai stakeholder seperti peran pemerintah dan insitusi serta lembaga kemitraan menjadi penting agar sektor ini tetap tumbuh, berkembang dapat bertahan dalam masa krisis ekonomi dan mendapatkan penguatan diri dalam mindset bisnis, manajemen usaha agar naik kelas serta dapat memanfaatkan teknologi dalam berbisnis (Ibrahim, 2022). Berbagai permasalahan dan tantangan dihadapi oleh usaha mikro dan kecil untuk mengembangkan usahanya pada skala selanjutnya khususnya untuk bisa mencapai skala kecil dan menengah. Berbagai permasalahan dan tantangan ini tentunya akan menuntut usaha dan percepatan dari pelaku usaha agar dapat beradaptasi dengan permintaan pasar saat ini. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya untuk meningkatkan skala bisnis pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah melalui Kegiatan Pendampingan UMKM dan diantaranya adalah pendampingan pelaku usaha di Kabupaten Majalengka.

Sebagai upaya peningkatan kelas usaha UMKM di Jawa Barat, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah membuat beberapa program yang salah satu program unggulannya adalah UMKM Juara. Program ini merupakan program yang sudah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat sebagai salah satu program unggulan untuk mencapai Jabar Juara

Lahir Batin melalui inovasi dan kolaborasi. Program ini mendorong UMKM untuk bisa tumbuh dan berkembang dari kecil ke menengah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, 2022).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana pendampingan UMKM melalui sinergitas pemberdayaan dalam konteks pemulihan ekonomi di Kabupaten Majalengka?; (2) Bagaimana peningkatan akses usaha setelah dilakukan pendampingan di Kabupaten Majalengka?. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan akses usaha melalui perizinan dan pemasaran setelah dilakukan pendampingan pada Program UMKM berbasis inovasi dan kolaborasi di Kabupaten Majalengka.

TINJAUAN PUSTAKA

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai potensi untuk meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat sehingga berperan sangat besar dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal dan menyediakan pekerjaan bagi komunitas setempat (Kurniawan *et al.*, 2024). UMKM ini juga dapat berperan untuk memajukan proses pengembangan masyarakat dan memaksimalkan pendapatan, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan berpartisipasi dalam proyek infrastruktur nasional (Deviantri dan Annisa, 2022). Hal tersebut sesuai dengan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Terdapat 65,5 juta UMKM di Indonesia yang mencakup 99% dari seluruh badan usaha. Pada tahun 2023, jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mencapai 66 juta jiwa, sehingga berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar, yakni sekitar 117 juta (97%) dari total angkatan kerja Indonesia. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia menyumbang sekitar 61% dari pendapatan Domestik Bruto (PDB), atau Rp 9,580 triliun. Selain itu, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memanfaatkan peluang di pasar global melalui Global Value Chain (GVC) maupun Global E- Commerce (GEC) dan terlibat dalam kegiatan ekspor yang meningkatkan daya saing mereka (Kurniawan *et al.*, 2024). Dengan demikian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berkontribusi sangat pesat terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia melalui penciptaan lapangan kerja, pengembangan industri dan peningkatan pendapatan masyarakat. Meningkatnya peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), maka akan terjadi pula peningkatan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. (Arif, 2023) ; (Hidayani, 2017).

Menurut PP No. 7 Tahun 2021 mengenai UMKM, menetapkan kriteria usaha kecil dengan menggunakan dasar modal usaha dan penjualan tahunan atau omset dengan kriteria : (1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan dengan kriteria aset maksimal sebesar 1 miliar dan memiliki omset maksimal 2 miliar ; (2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan bagian dari perusahaan lain, dengan kriteria aset lebih dari 1 miliar sampai 5 miliar dan memiliki omset lebih dari 2 miliar sampai

dengan 15 miliar ; (3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan bagian dari perusahaan lain, dengan kriteria aset 5 miliar sampai 10 miliar dan omset sebesar 15 miliar sampai dengan 50 miliar. Selanjutnya Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2008, memberikan definisi yang lebih spesifik tentang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berdasarkan jumlah tenaga kerja. Menurut BPS, Usaha Kecil adalah entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja antara 5 hingga 19 orang. Sementara itu, Usaha Menengah adalah entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja antara 20 hingga 99 orang. Definisi ini memberikan parameter yang lebih terukur dalam mengklasifikasikan UKM berdasarkan skala dan kapasitas kerja. Hal ini memungkinkan pemerintah, lembaga pengawas, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan dukungan dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing jenis UKM. Selain itu, definisi ini juga membantu dalam menyusun strategi pengembangan dan pemetaan potensi UKM dalam perekonomian nasional, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, definisi BPS tentang UKM berdasarkan jumlah tenaga kerja menjadi landasan yang penting dalam upaya memahami dan mendukung sektor UKM di Indonesia (Yolanda, 2024).

UMKM membantu dalam pemerataan ekonomi dengan menyediakan peluang ekonomi di berbagai daerah, tidak hanya di pusat kota besar tetapi juga di pedesaan dan daerah terpencil. Akses pasar yang lebih baik dapat menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM. Dengan akses pasar yang lebih luas, UMKM dapat meningkatkan volume penjualan dan memperbesar skala operasi usaha serta UMKM dapat belajar dan beradaptasi untuk meningkatkan daya saing produk (Sulastri *et al.*, 2024). Di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang, keberadaan UMKM tidak hanya menyediakan sumber penghidupan bagi jutaan orang, tetapi juga menjadi motor penggerak inovasi dan kreativitas di tingkat lokal. Seiring dengan tantangan yang dibawa oleh globalisasi dan persaingan pasar yang semakin ketat, upaya untuk memperkuat daya saing UMKM menjadi sangat penting. Salah satu pendekatan yang efektif adalah melalui program pendampingan yang dirancang untuk membantu UMKM meningkatkan efisiensi operasional dan akses ke pasar yang lebih luas (Luthfiyah *et al.*, 2025).

Pendampingan merupakan aktivitas pemberdayaan masyarakat yang melibatkan tenaga pendamping yang berfungsi sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisator untuk menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Pendampingan merupakan proses untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan yang bertujuan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan kebutuhan mereka (Ningtyas dan Farida, 2024). Pendamping hanya memberikan bimbingan, saran, dan bantuan konsultatif tanpa memiliki otoritas lebih, sementara masyarakat yang didampingi harus memiliki tujuan yang sejalan. Pendampingan dapat menjadi salah satu solusi untuk pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan, pembinaan baik dalam bentuk materi, fasilitas, maupun proses sehingga memberikan dampak signifikan terhadap usaha pelaku UMKM (Anggoro dan Pertiwi, 2023). Secara umum, pendampingan merupakan upaya untuk

meningkatkan berbagai kemampuan individu dalam masyarakat dengan tujuan agar kehidupan di masa depan lebih layak. Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendampingan adalah kegiatan yang membantu individu atau kelompok masyarakat dalam menentukan keberhasilan program yang dijalankan (Ningtyas dan Kusuma,2024) ; (Ningtyas dan Farida,2024).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ningtyas dan Kusuma (2024), Dengan terlaksananya program pendampingan UMKM yang dilakukan oleh mahasiswa magang MSIB Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya memberikan banyak dampak serta pembelajaran bagi para pedagang di SWK Urip Sumoharjo yaitu melalui pendampingan manajemen produk, pemasaran, keuangan serta sumber daya manusia dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas usaha para pedagang serta membuka akses pasar yang lebih luas dimana dapat menciptakan banyak peluang bagi pedagang untuk tumbuh dan bersaing di pasar yang lebih besar dan meningkatkan taraf hidup para pedagang. Hal tersebut terjadi peningkatan usaha dan akses pasar pada UMKM yang berfokus pada pengembangan internal dan berorientasi pada strategi eksternal untuk menjangkau konsumen. Gabungan keduanya memungkinkan bisnis tidak hanya berkembang secara internal tetapi juga memperoleh dan mempertahankan pangsa pasar yang lebih besar.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat dengan sebaran tempat lokasi penelitian secara purposive yaitu di Kecamatan Sukahaji, Kecamatan Rajagaluh, Kecamatan Cigasong, Kecamatan Sindangwangi, Kecamatan Panyingkiran dan Kecamatan Majalengka. Penelitian ini dirancang menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif (Fadli, 2021), dimana penulis ingin menggambarkan fenomena secara holistik-kontekstual mengenai pendampingan UMKM Juara berbasis inovasi dan kolaborasi dalam meningkatkan akses bisnis pelaku UMKM di Kabupaten Majalengka.

Sampel penelitian ini adalah pelaku usaha dampingan yang menjadi peserta program UMKM Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2023-2024 dengan jumlah sampel yaitu sebanyak 50 Pelaku UMKM di Kabupaten Majalengka. Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu berupa data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari pelaku usaha dampingan peserta UMKM Juara dan UMKM Naik Kelas Kabupaten Majalengka, Koordinator Pendamping UMKM Kabupaten Majalengka, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat serta Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka. Sedangkan data sekunder peneliti dapatkan dari berbagai jurnal ilmiah, berita, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

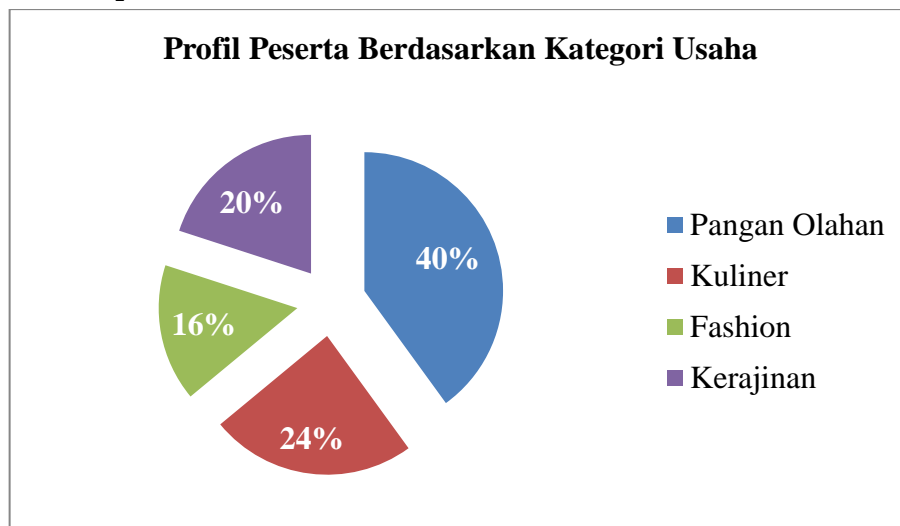
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi studi lapangan dan wawancara mendalam dimana sampel dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling serta dokumentasi (Fadli, 2021) ; (Fitrah dan Lutfuyah, 2017). Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif

kualitatif yang meliputi beberapa tahapan (Miles *et al*, 2019). Tahapan yang pertama adalah, reduksi data yang merupakan pemilahan informasi yang bermakna dan relevan. Kedua, yaitu penyajian data, merupakan penyusunan secara sistematis data yang diperoleh agar lebih mudah dipahami. Ketiga, yaitu penarikan kesimpulan yang merupakan proses pencarian makna dari data yang dikumpulkan untuk menjawab permasalahan yang ada. Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan triangulasi untuk membangun pembenaran yang koheren. Triangulasi yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara memberikan pertanyaan yang sama kepada seluruh responden dengan tujuan untuk mengkoherensikan data, operasional teori, serta intrepetasi peneliti (Suyoto dan Anggraini, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Pelaku UMKM di Kabupaten Majalengka

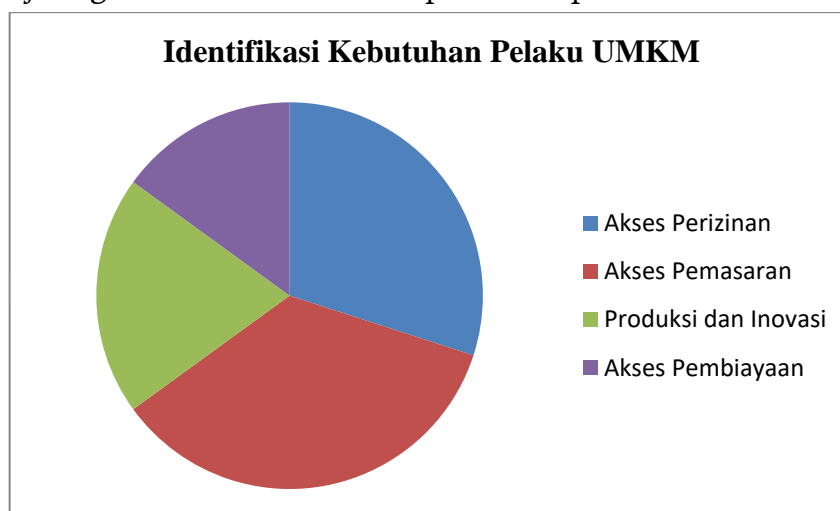
Peserta yang mengikuti program UMKM Tahun 2023-2024 di Kabupaten Majalengka memiliki latar belakang usaha dengan jenis usaha yang berbeda yaitu : dibidang pangan olahan, bidang kuliner, bidang fashion dan bidang kerajinan dengan skala usaha mikro dan kecil. Dengan kriteria usaha sudah berjalan minimal 1 tahun dan pelaku usaha merupakan penduduk Jawa Barat serta memiliki motivasi wirausaha yang tinggi. Harapan dari kegiatan ini para pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Majalengka dapat naik kelas dan omset yang dihasilkan meningkat. Pada kegiatan ini di prioritaskan bagi para pelaku usaha yang memiliki produksi sendiri (bukan pelaku usaha di bidang jasa) agar hasil karya para pelaku UMKM di Kabupaten Majalengka dapat berkesempatan mengikuti kegiatan Business Matching dan Pameran (*Benchmarking*) baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional serta Tingkat Internasional. Adapun profil pelaku UMKM Tahun 2023-2024 berdasarkan kategori usaha dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Profil Pelaku UMKM Juara Berdasarkan Kategori Usaha

Pada tahap awal Pendampingan, masing-masing pendamping melakukan identifikasi kepada para pelaku UMKM di Kabupaten Majalengka untuk mengidentifikasi

permasalahan apa saja yang dihadapi oleh para pelaku usaha selama ini dalam menjalankan bisnisnya dan apa saja yang dibutuhkan para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya. Hasil identifikasi diperoleh hasil bahwa para pelaku usaha mengalami beberapa hambatan dalam mengembangkan usahanya, hambatan tersebut diantaranya yaitu : 1) proses legalitas produk yang belum lengkap, 2) akses pemasaran yang belum berkembang, 3) belum menemukan mesin produksi yang tepat guna, 4) belum adanya inovasi dalam produk dan kemasannya, 5) belum optimalnya pemasaran online dan digitalisasi, dan 5) belum adanya akses pembiayaan untuk mengembangkan usahanya. Dari identifikasi hambatan tersebut maka dapat diketahui identifikasi kebutuhan apa saja yang di perlukan oleh para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Majalengka pada saat ini. Adapun akses kebutuhan pelaku UMKM di Kabupaten Majalengka Tahun 2023-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Identifikasi Kebutuhan Pelaku UMKM di Kabupaten Majalengka

Program Pendampingan UMKM Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat

Sejak tahun 2019 hingga tahun 2021 di Jawa Barat, sesuai dengan RPJMD Perubahan pada tahun 2018-2023 mencetak 1.300 usaha pemula per tahun sehingga jumlah usaha pemula sebanyak 3.900 usaha pemula. Berbagai permasalahan dan tantangan dihadapi oleh usaha mikro dan kecil untuk mengembangkan usahanya pada skala selanjutnya khususnya untuk bisa mencapai skala kecil dan menengah. Berbagai permasalahan dan tantangan ini tentunya akan menuntut usaha dan percepatan dari pelaku usaha agar dapat beradaptasi dengan permintaan pasar saat ini. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya untuk meningkatkan skala bisnis pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah melalui Kegiatan UMKM (Suryana dan Sutopo, 2022).

Program ini merupakan program yang sudah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat sebagai salah satu program unggulan untuk mencapai Jabar Juara Lahir Batin melalui inovasi dan kolaborasi. Target peserta Kegiatan UMKM Juara ini berasal dari wirausaha di Jawa Barat yang berkomitmen untuk maju dan berkembang di bidang bisnis (Suryana dan Sutopo, 2019). Manfaat yang diperoleh oleh pelaku usaha yang mengikuti kegiatan

ini adalah penguatan diri dalam mindset bisnis, manajemen usaha untuk bisa naik kelas, dan pemanfaatan teknologi dalam berbisnis khususnya teknologi informasi untuk memperluas pasar. Fasilitasi akses pasar yang ditawarkan program ini antara lain; optimalisasi marketplace, pameran tingkat provinsi dan luar provinsi bagi pelaku usaha terbaik. Peserta juga mendapatkan akses pembiayaan ke perbankan, fintech, program *Corporate Social Responsibility* (CSR) serta investor. Yang tidak kalah penting adalah akses ke media, berupa media cetak, elektronik di kabupaten/kota di Jawa Barat. Tidak lupa pula akses perizinan berupa merek, PIRT, BPOM, Halal (Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat, 2023).

Program UMKM Juara ini berlangsung selama empat bulan setiap tahunnya dan dilaksanakan serentak pada 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat termasuk di Kabupaten Majalengka. Adapun materi yang diberikan selama program ini berlangsung dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu mindset dan bisnis, pemasaran serta manajemen bisnis. Untuk dapat menjalankan program UMKM diperlukan sinergi dari berbagai pihak di tingkat Provinsi Jawa Barat dan tingkat kabupaten/kota yaitu dengan sinergitas ABGCM yaitu Akademisi, Bussines, Government, Community dan Media (Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat, 2020).

- a. Akademisi yaitu para dosen dan guru-guru yang ada di kabupaten/kota di Jawa Barat. Mereka akan memberikan konsep dan teori untuk pengembangan UMKM. Bahkan akademisi bisa melibatkan UMKM sebagai bagian dari program pengabdian masyarakat selain penelitian ;
- b. Bisnis yaitu perusahaan dan perbankan yang memiliki operasional di kabupaten/kota serta pengusaha yang bisa menjadi off taker bagi produk UMKM. Selain itu, perusahaan dan perbankan bisa membantu akses pasar dan akses pembiayaan bagi peserta UMKM yang mengikuti program pendampingan ;
- c. Komunitas merupakan kelompok masyarakat yang memiliki anggota untuk bisa menjadi peserta program pendampingan UMKM dan pengurus komunitas menjadi pihak yang membantu untuk mendampingi anggotanya untuk menjadi peserta ;
- d. Pemerintah yang terdiri dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait di kabupaten/kota;
- e. Media yaitu media cetak ataupun media elektronik yang ada di kabupaten/kota.

Menurut (Harto *et al.*, 2020), dengan adanya sinergitas pendampingan ABGCM (Akademisi, Bussines, Government, Community dan Media) dalam program UMKM Juara diharapkan dapat tercapai beberapa Indikator yang telah dirumuskan pada petunjuk teknis Program UMKM Juara Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat yaitu terdiri dari : (1) Peningkatan omset dan aset, (2) Memiliki mindset kewirausahaan yang benar dalam menumbuhkembangkan bisnis, (3) Menerapkan manajemen yaitu manajemen stratejik, manajemen keuangan, pemasaran, operasi dan sumber daya manusia, (4) Melakukan digitalisasi bisnis dengan menggunakan teknologi serta, (5) Memiliki akses pasar, (6) Memiliki akses perizinan, (7) Akses pembiayaan, (8) Akses media, (9) Inovasi produk dan (10) UMKM yang berdaya saing.

Pendampingan merupakan salah satu tahap pada Kegiatan UMKM Juara dan pendampingan yang dilakukan mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 2 Tahun 2016 Tentang Pendampingan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil. Pendampingan adalah proses peningkatan produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM melalui bimbingan, konsultasi dan advokasi yang dilakukan oleh lembaga pendamping dan tenaga pendamping perorangan (Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat, 2023). Pelaksana pendampingan UMKM terdiri dari 2 kelompok, yaitu: Pendamping UMKM dan Koordinator Pendamping Daerah yang bersedia untuk melakukan pendampingan ke lokasi tempat di masing-masing wilayah yang ada di Kabupaten Majalengka (Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat, 2023). Pendamping UMKM di Kabupaten Majalengka terdiri dari beberapa unsur kriteria yaitu :

1. Akademisi : merupakan pengajar/pengelola incubator bisnis/ klinik konsultasi bisnis pengalaman minimal 5 tahun, pendidikan minimal S2, memiliki portofolio pada dunia UMKM.
2. Pendamping UMKM yang telah memiliki sertifikat Pendamping UMKM sesuai dengan SKKNI Pendamping yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau portofolio pendamping UMKM minimal 3 tahun.
3. Pelaku usaha di kabupaten / kota setempat yaitu di Kabupaten Majalengka dengan pengalaman usaha min. 5 tahun, omset minimal 300 juta rupiah, memiliki kemampuan memotivasi, memiliki badan usaha, memiliki laporan keuangan, memahami BMC dan Business plan

Kegiatan pembinaan dan pendampingan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Majalengka ini merupakan salah satu tahapan pemberdayaan dan pengembangan usaha ekonomi produktif. Pelaksanaan pendampingan UMKM dalam Peningkatan Akses Usaha Berbasis Inovasi dan Kolaborasi di Kabupaten Majalengka melibatkan beberapa stakeholders atau pemangku kepentingan yang mendukung yaitu dapat dilihat pada Tabel 1. Kolaborasi Kegiatan Pada Program UMKM di Kabupaten Majalengka dengan sinergitas ABGCM (Akademisi, Bisnis, Government, Community dan Media) memiliki peran untuk membangun partisipatif aktif baik dari unsur pemerintah, akademisi, swasta, masyarakat dan media untuk meningkatkan kelas usaha dan kualitas usaha UMKM di Provinsi Jawa Barat khususnya di Kabupaten Majalengka yang mampu berdaya saing.

Dengan adanya kolaborasi dan sinergitas dari beberapa unsur stakeholders pada program UMKM di Kabupaten Majalengka maka tercipta inovasi dalam pendampingan dan dapat meningkatkan akses usaha seperti peningkatan akses perizinan dan akses pemasaran bagi UMKM di Majalengka. Menurut Ningtyas dan Kusuma (2024), peningkatan akses pasar pada UMKM menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM. Dengan akses ke pasar yang lebih luas, UMKM dapat meningkatkan volume penjualan dan memperbesar skala operasi usaha serta UMKM dapat belajar dan beradaptasi untuk meningkatkan daya saing produk atau layanan UMKM.

Tabel 1. Sinergitas Kolaborasi yang Terlibat dalam Program UMKM di Kabupaten Majalengka

No	Stakeholders	Peran dalam Kolaborasi
1.	Pemerintah (Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat)	<i>Leading sector</i> yang membuat kebijakan program UMKM serta menjadi fasilitator dan mediator dalam kolaborasi.
2.	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Majalengka	Fasilitator dalam Kolaborasi untuk mendukung Program UMKM di Kabupaten Majalengka.
3.	Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Majalengka	Kolaborasi untuk Akses Perizinan bagi Peserta UMKM di Kabupaten Majalengka (NIB, PIRT dan Sertifikasi Halal).
4.	Masyarakat	Peserta UMKM di Kabupaten Majalengka.
5.	Bisnis	<ul style="list-style-type: none"> • Pendamping UMKM Kabupaten Majalengka • <i>Off Taker</i> untuk Penguatan Akses Pemasaran di Kabupaten Majalengka (Majalengka Mart, Gerai UMKM, PD.SMU)
6.	Akademisi	Pendamping UMKM Kabupaten Majalengka.
7.	Media	Penyambung Informasi dalam Program UMKM di Kabupaten Majalengka.
8.	Perbankan / <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	Kolaborasi dengan Bank BJB Majalengka dan Bank Indonesia Cabang Cirebon untuk Akses Pembiayaan bagi Peserta UMKM di Kabupaten Majalengka.
9.	Kemitraan CSR Bank Indonesia Cabang Cirebon dan Enturk Trading Hepsiglobal	Kolaborasi untuk Akses Pemasaran ke <i>Marketplace</i> bagi Peserta UMKM di Kabupaten Majalengka Program <i>On Boarding</i> KpwBI Ciayumajakuning dan Ekspor Retail Pasar Turki Hepsiglobal.
10.	Kementerian Komunikasi dan Informasi RI dan Micromentor Indonesia	Kolaborasi untuk Teknologi Informasi dan Digitalisasi UMKM di Kabupaten Majalengka.

Sumber : Data Hasil Penelitian, 2024

Berdasarkan hasil penelitian pendampingan UMKM di Kabupaten Majalengka berdasarkan kebutuhan akses perizinan dan pemasaran berbasis Inovasi dan Kolaborasi yang dilakukan di Kabupaten Majalengka selain dapat meningkatkan akses usaha bagi pelaku usaha dampingan melalui akses perizinan (80 %) dan akses pemasaran (64 %) tetapi juga dapat memulihkan dampak dari pandemi Covid-19 sebesar 82 %. Adapun hasil peningkatan dari kegiatan pendampingan UMKM Sinergitas Inovasi dan Kolaborasi di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Peningkatan UMKM Berbasis Inovasi dan Kolaborasi

No	Peningkatan Akses Usaha	Sebelum Pendampingan	Sesudah Pendampingan	Persentase Peningkatan
1.	Akses Perizinan	10 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	80 %
2.	Akses Pemasaran	15 Pelaku Usaha	47 Pelaku Usaha	64 %
3.	Bangkit dari Pandemi Covid-19 dengan peningkatan omset dan kapasitas produksi	8 Pelaku Usaha	49 Pelaku Usaha	82 %

Sumber : Data Hasil Penelitian, 2023

Adapun konsep program UMKM Pada Tahun 2023 berfokus pada digital marketing, akses legalitas perizinan dan akses pembiayaan dalam konteks pemulihan ekonomi. Konsep pendampingan UMKM dalam pemulihan ekonomi yaitu (1) Saling beli, saling memasarkan dan saling tulungan, (2) Pendampingan kepada pelaku usaha dampingan dengan materi pendampingan sesuai kondisi lapangan untuk penguatan UMKM Juara, (3) Pembuatan Katalog UMKM Juara unggulan dan (4) *Off taker* di tingkat Kabupaten dan Provinsi (Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat, 2023). Sedangkan inovasi pendampingan pada Tahun 2024 yaitu dengan konsep UMKM Go Digital, Go Formal, Go Modern dan Go Global. (1) Inovasi yang dilakukan pada Program UMKM di Kabupaten Majalengka untuk mewujudkan UMKM *Go Digital* yaitu memfasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi peserta UMKM Juara dalam akses pemasaran ke jangkauan yang lebih luas lagi melalui pemanfaatan *e-commerce*, Sosial Media, website, dan *marketplace*. Program pendampingan yang telah dilakukan untuk meningkatkan kemampuan tersebut berupa pelatihan digital marketing (*onboarding*) dengan aplikasi pasarmu.id, Shopee, Go Food dan Grab Food, pelatihan foto produk, pelatihan branding, dan sebagainya. Kegiatan pendampingan *Go Digital* difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Majalengka, Bank Indonesia Cabang Cirebon dan Kementerian Komunikasi dan Informasi RI. (2) Inovasi yang dilakukan pada Program Pendampingan UMKM di Kabupaten Majalengka untuk mewujudkan UMKM *Go Formal* yaitu memfasilitasi pelaku usaha untuk memiliki legalitas usaha minimal memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dan NPWP, selain itu beberapa perizinan yang berkaitan langsung dengan proses produksi dan produk akhir yang dihasilkan, yaitu fasilitasi sertifikat P-IRT, BPOM, Halal dan berbagai perlindungan kekayaan intelektual (HaKI) dan Merek. Program pendampingan Go Formal bertujuan agar UMKM memiliki legalitas usaha dan merupakan salah satu syarat agar UMKM bisa mengurus izin operasional dan mendapatkan insentif lain seperti mengikuti pameran, pelatihan, dan berbagai program pemerintah lainnya. Kegiatan pendampingan Go Formal difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Majalengka, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Majalengka. (3) Inovasi yang dilakukan pada Program Pendampingan UMKM di Kabupaten Majalengka untuk mewujudkan UMKM Go Modern yaitu memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pelaku usaha agar memiliki rencana usaha, *brand identity*, dan merek, laporan keuangan sesuai standar, serta proyeksi keuangan bisnis. Dengan tercapainya target itu, diharapkan UMKM bisa mendapatkan akses modal yang lebih besar. Bentuk pendampingan yang telah diberikan kepada peserta UMKM Juara agar Go Modern adalah pendampingan rencana usaha, *brand identity*, laporan keuangan, dan proyeksi keuangan bisnis yang difasilitasi oleh Akademisi dan Praktisi Pendamping UMKM Juara, Bank Indonesia Cabang Cirebon serta BJB Kabupaten Majalengka. (4) Inovasi yang dilakukan pada Program UMKM di Kabupaten Majalengka untuk

mewujudkan UMKM Go Global yaitu memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pelaku usaha bertujuan agar UMKM bisa menghasilkan produk berkualitas global dengan harga yang kompetitif, sehingga tidak kalah dengan produk impor yang masuk ke pasar dalam negeri dan bisa bersaing di pasar global disesuaikan dengan target segmen pasar masing-masing. Inovasi pada program ini adalah mendorong agar UMKM memiliki badan usaha; mempunyai perizinan/sertifikat standar yang disetujui dan diverifikasi; dilengkapi katalog produk dan *company profile* dalam bahasa Inggris; ada SOP; serta mampu memproduksi dalam skala besar dan siap untuk masuk ke pangsa ekspor yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Majalengka, Akademisi dan Praktisi Pendamping UMKM Juara serta *Off Taker* yang memiliki jejaring ekspor seperti Enturk Trading Hepsi Global untuk pangsa pasar ke Turki (Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat, 2024).



Gambar 3. Kegiatan Pendampingan UMKM di Kabupaten Majalengka

Kegiatan pendampingan berbasis inovasi dan kolaborasi dengan konsep UMKM Go Digital, Go Formal, Go Modern dan Go Global yang telah dilakukan pada program UMKM di Kabupaten Majalengka sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Firdausya dan Ompusunggu (2023), melalui kegiatan pendampingan UMKM di Era Digital Abad 21 dengan pemanfaatan akses teknologi digital dapat membantu UMKM untuk meningkatkan efisiensi operasional, mencapai pasar yang lebih luas, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan akses dan keterampilan dalam penggunaan teknologi digital yang perlu diatasi. Oleh

karena itu, pemerintah dan organisasi terkait perlu memberikan dukungan dan pelatihan yang diperlukan kepada UMKM agar dapat memanfaatkan teknologi digital secara optimal.

Kegiatan pendampingan program UMKM yang telah dilakukan di Kabupaten Majalengka tidak hanya berkolaborasi dengan pemerintah, swasta dan kelembagaan kemitraan saja tetapi juga berkolaborasi dengan akses media. Pendamping akan membantu pelaku usaha untuk mendapatkan akses media dari pihak-pihak terkait yang ada di Kabupaten Majalengka dengan inovasi membuka akses media bagi pelaku usaha, membangun kerja sama dengan media cetak, elektronik dan media online agar pelaku usaha dapat mengikuti program di media, serta pelaku usaha mengikuti talkshow yang diliput oleh media. Menurut (Ibrahim, 2022), Kolaborasi dan Peran pemerintah, insitusi serta lembaga kemitraan menjadi penting bagi UMKM agar sektor ini tetap tumbuh dan bertahan terutama dalam masa krisis ekonomi atau karena pandemi Covid-19. Diperkuat oleh (Murray *et al.* 2013) juga memetakan proses penciptaan inovasi sosial dengan memberikan penekanan pada proses kolaborasi, baik pada level perencanaan maupun pada tataran implementasi inovasi sosial. Untuk mewujudkan inovasi sosial beberapa tahapan yang perlu dipahami, antara lain: *Pertama*, inovasi sosial dan masalah sosial perlu diidentifikasi untuk menemukan kondisi yang tidak ideal; *Kedua*, menghasilkan gagasan bersama, dengan bekerjasama dengan semua pemangku kepentingan untuk mencari kesesuaian dan persamaan pandangan terhadap suatu masalah sosial; *Ketiga*, mengukur dan menyesuaikan kapasitas dengan cara mengukur kemampuan diri dengan melakukan studi kelayakan terhadap program yang akan dijalankan; *Keempat*, melakukan kerjasama berbasis kemitraan dengan melakukan pendekatan kolaboratif dengan berbagai relasi dari berbagai bidang, dan; *Kelima*, menghasilkan inovasi sosial, yang mampu memecahkan masalah sosial dan berdampak baik terhadap masyarakat.

Dengan demikian untuk memperkuat daya saing sektor UMKM maka pelatihan, pendampingan dan peningkatan inovasi dan kolaborasi secara berkesinambungan melalui program pemberdayaan UMKM Juara di Kabupaten Majalengka sangat diperlukan. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian Ibrahim (2022), yang menyatakan bahwa untuk memperkuat posisi sektor UMKM maka pemerintah perlu melakukan peningkatan dan penguatan adopsi inovasi-inovasi kreatif dari masyarakat dalam bentuk kerjasama antar komunitas dan kelembagaan pemerintah, maupun melalui bentuk sistem pembelajaran berbasis partisipatif dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada kelompok masyarakat atau komunitas yang dikembangkan secara nasional. Upaya pemerintah bersama kalangan dunia usaha dan masyarakat pada umumnya perlu mempercepat kolaborasi multi sektoral, sebagai upaya memperbaiki ekonomi nasional yang sangat menurun akibat dampak Covid 19. Salah satu kolaborasi yang perlu dilembagakan adalah melalui pelembagaan institusi ekonomi berbasis inovasi sosial dan kolaborasi dengan memperluas dan memperbanyak model-model kolaborasi ekonomi yang berkaitan sumber daya lokal dengan memadukan potensi sumber daya alam dan potensi ekonomi masyarakat (Sugiri, 2020).

SIMPULAN

Program Kegiatan UMKM di Kabupaten Majalengka yaitu terdiri dari pendampingan dan pelatihan akses perizinan, akses pemasaran, manajemen dan rencana usaha, akses pembiayaan dan berbagai fasilitas lainnya agar pelaku usaha mampu Go Digital, Go Formal, Go Modern dan Go Global dan produknya berdaya saing. Dengan pemberdayaan UMKM Juara di Kabupaten Majalengka sinergitas ABGCM berbasis inovasi dan kolaborasi dapat meningkatkan akses usaha melalui perizinan sebanyak 80 %, peningkatan pemasaran sebesar 64 % dan UMKM bangkit dari pandemi Covid-19 (mengalami kenaikan omset dan kapasitas produksi) sebesar 82 %. Program UMKM yang sudah berjalan di Kabupaten Majalengka telah memberikan dampak positif bagi kemajuan UMKM untuk dapat mengembangkan usahanya baik dirasakan di Kabupaten Majalengka maupun di tiap Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan Terimakasih kepada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (DISKUK) Provinsi Jawa Barat, Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DKKUKM) Kabupaten Majalengka, Rekan-Rekan Pendamping UMKM dan Pelaku Usaha Peserta Pendampingan UMKM di Kabupaten Majalengka serta pihak lainnya yang telah membantu selama penelitian. Penelitian ini merupakan bagian dari Program Pemberdayaan UMKM yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (DISKUK) Provinsi Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, B.Y & Pertiwi, T.K. (2023). Peran Pendamping untuk Memperluas Akses Pasar Nasabah BTPN Syariah yang Berprofesi sebagai Pelaku UMKM. *Jurnal Samawa University*, 3(2), 197-201.
- Arif, E. (2023). Internasionalisasi usaha kecil menengah. Malang : UB press.
- Badan Pusat Statistik. 2008. Statistik Indonesia. Jakarta: BPS.
- Deviantri dan Annisa. (2022). Peran Inovasi, Kolaborasi dan Media Sosial terhadap Kinerja Usaha UMKM di DKI Jakarta. *Jurnal Orientasi Bisnis dan Entrepreneurship*, 3(1), 52 – 63.
- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. (2020). Petunjuk Teknis Pendampingan UMKM Juara Tahun 2020. Bandung. 48 pp.
- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. (2022). Petunjuk Teknis Pendampingan UMKM Juara Tahun 2022. Bandung. 49 pp.
- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. (2023). Petunjuk Teknis Pendampingan UMKM Juara Tahun 2023. Bandung. 46 pp.
- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. (2024). Petunjuk Teknis Kegiatan UMKM Naik Kelas Tahun 2024. Bandung. 50 pp.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21 (1), 33-54.
- Firdausya, L. Z., & Ompusunggu, D. P. . (2023). Micro, Small And Medium Enterprises (Msme) The Digital Age Of The 21st Century: Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm) Era

- Digital Di Abad Ke-21. *Tali Jagad Journal*, 1(1), 14–18. <https://doi.org/10.55732/unu.tjj.2023.01.3>.
- Fitrah & Lutfiyuh. (2017). *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*. CV Jejak Publisher.
- Handayani, R. (2017). Analisis Peran Perbankan, Perluasan Pasar dan Quality Kontrol Dalam Upaya Mengembangkan UMKM Berdaya Saing : Studi Kasus UMKM di Kecamatan Medan Denai Kota Medan. *EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 17(2), 174-184.
- Harto, B., Saidah, L & Rukmanda, M.R. (2020). Pelatihan Pembuatan Business Plan Menggunakan Aplikasi Excel Bagi UMKM Juara Kota Bandung. *Jurnal Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan*, 2 (1), 18-22.
- Ibrahim, H. R. (2022). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil, Menengah Melalui Pendekatan Inovasi Sosial dan Collaborative Governance. *Jurnal Ilmu dan Budaya*, 43 (1), 103-116.
- Kurdi, M., Nisa, D.A., Rahmah, U., Andini, D.I., Ardianty, R.S., Amir, M., Taqwim, M.A., & Wahyudi, A. (2024). MSME Assistance: Increasing Competitiveness and Innovation in the Digital Era for Gold Star MSMEs in Kasengan Village, Manding District, Sumenep Regency. *Dinamika Sosial : Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Transformasi Kesejahteraan*, 1 (2), 31-39.
- Kurniawan, V., Faisal, M., Ansori, R., & Pangaribuan, R. Y. (2024). Pengaruh UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Terhadap Peningkatan Perekonomian Indonesia Tahun 2024. *Musyteri : Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 9(4), 111–120. <https://doi.org/10.8734/musyteri.v9i4.6416>.
- Luthfiyah, A., Humaidah, A., Fazira, D., & Alisa, I. 2025. Penerapan Peran UMKM dalam Membangun Ekonomi Syariah di Kota Medan. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(1), 01-13. DOI: <https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i1.1493>.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (Fourth Edition)*. SAGE Publications.
- Murray, R., Caulier-Grice, J., & Mulgan, G. (2010). *The open book of social innovation*. National Endowment for Science, Technology and the Art. <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.0030166>.
- Ningsih, N. W., Aryati, I., & Widayant, R. (2019). Analisis Literasi Keuangan, Persyaratan Pembiayaan dan Keberlangsungan Usaha Terhadap Kemudahan Akses Pembiayaan Formal Pada UMKM. *Edunomika*, 03(02), 453–460.
- Ningtyas, A.K & Farida,S.N. (2024). Peranan Fasilitator Pendamping Untuk Meningkatkan Pendapatan Dan Skill Nasabah Btpn Syariah Kec. Wiyung Dalam Berwirausaha. *Jurnal Akuntan Publik*, 2(1), 148–155. <https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v2i1.2481>.
- Ningtyas, A.K & Kusuma, Y.B. (2024). Peranan Pendampingan UMKM Untuk Meningkatkan Usaha Dan Akses Pasar Pedagang SWK Urip Sumoharjo. *Journal of Creative Student Research*, 2(4), 103–116. <https://doi.org/10.55606/jcsr-politama.v2i4.4006>.
- Nur, M. I., Juana, T., Ningrum, E. W & Sutisna, S. (2022). Collaborative Governance In The UMKM Juara Program as an Effort to Increase The Competence of West Java Enterprises. *AdBispreneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, 7 (1), 1-16.
- Soebiantoro, & Haryanti, N. (2024). Peningkatan Akses Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Transgenera: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 1(2), 122-136. <https://doi.org/10.35457/transgenera.v1i2.3795>

- Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19. *Jurnal Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 19 (1), 76-86.
- Sulastri, N., Sucynurhaliza, R. ., Rizqiani, A. Z. ., Supartika, I. ., Michdhan, M. N. ., & Lestari, N. . (2024). Pengembangan Pemasaran Produk Berbasis Digital Melalui Pemanfaatan Teknologi Pada UMKM Kripik Singkong. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 5(2), 1623-1630. <https://doi.org/10.46306/jabb.v5i2.1296>.
- Suryana, T & Sutopo, I. E. (2019). Petunjuk Teknis Kegiatan UMKM Juara Tahun 2019. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provisi Jawa Barat. Bandung. 44 pp.
- Suryana, T & Sutopo, I. E. (2022). Petunjuk Teknis Kegiatan UMKM Juara Tahun 2022. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provisi Jawa Barat. Bandung. 46 pp.
- Suyoto, R. S & Anggraini, O. (2016). Partisipasi Wanita Nelayan Dalam Pengelolaan Lingkungan Wilayah Pesisir Kabupaten Bantul. *Jurnal Media Wisata*, 14 (2), November, 470-482.
- Yolanda, C. (2024). Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 2(3), 170-186. DOI:10.36490/jmdb.v2i3.1147.